



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAKASSAR**

3. Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi

4. Meningkatnya Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN).

Capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 yaitu: Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian indikator sasaran ini 97,50%. Indikator tersebut adalah Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 100% atau mencapai 100% dari target 100%, Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dengan capaian sebesar 83,25% atau mencapai 92,50% dari target 900%, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan capaian sebesar 90% atau mencapai 100% dari target 90%.

Sasaran 2 yaitu : Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Capaian indikator sasaran ini 98,38%, diukur dengan 2 (dua) indikator satu indikator telah mencapai atau melebihi, dengan indikator yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk dengan realisasi sebesar 1,23% atau 102,44% dari target 1,26%, dan indikator yang tidak mencapai target yaitu Total Fertility Rate (TFR) dengan realisasi 2,10 TFR atau 94,76% dari target 1,99 TFR.

Sasaran 3 yaitu: Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan Kesehatan Reproduksi dengan capaian indikator sasaran 92,09%. Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut 1 (satu) indikator telah mencapai/melebihi target yang ditentukan yaitu Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun dengan realisasi 67,96% atau 101,43 % dari target 67%, dan indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi 32,61% atau 82,74% dari target 39,41%.

Sasaran 4 yaitu : Meningkatnya Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN) dengan capaian indikator sasaran 98,16%. Yang terdiri dari 2 (dua) indikator

sasaran yang tidak mencapai target. Indikator sasaran tersebut yaitu, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB dengan realisasi 74,82% atau 96,59% dari target 77,46%, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB dengan realisasi 70,52% atau 99,72% dari target 70,72%.

Sehingga jika di rata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021 bobotnya adalah 96,97%.

Laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makasaar merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja telah dilaksanakan dan akan ditingkatkan lagi kinerjanya pada masa mendatang.

DAFTAR ISI

I.	Ringkasan Eksekutif	i
II.	Daftar Isi.....	iv
III.	Kata Pengantar.....	v
IV.	BAB I PENDAHULUAN.....	1
V.	BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
VI.	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
VII.	BAB IV PENUTUP.....	40

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2021.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kami menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun ini dapat memberi gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021.

Makassar, 29 Januari 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Drg. Ita Idiana Anwar, M.Kes

Pangkat : Pembina / IV. a

NIP. 19680829 200604 2 006

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2021 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya anggaran maupun kewenangan dalam melayani yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja (LKJ) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dikembangkannya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini untuk mendorong terciptanya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

- Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan instruksi presiden tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui akuntabilitas kinerja maka dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian tumbuh suatu kondisi dimana semua organisasi pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, maka tidak akan diketahui secara tepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penyusunan LAKIP bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah perwujudan dan implementasi sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dapat tercapai, yang diimplementasikan lewat program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan dari capaian kinerja yang berhasil diperoleh diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKJ).

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selain menjalankan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 3. Seksi Data dan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan:
 1. Seksi Penyuluhan dan KIE;
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. SUMBER DAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang ditempatkan pada sekretariat dan Bidang- bidang. Pada Tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar adalah sebanyak 94 Pegawai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2021

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pejabat Struktural	7	17	24
2.	Staf	5	9	14
3.	Tenaga Honorer	16	34	50
4.	Tenaga Sukarela	2	4	6
JUMLAH		30	64	94

Dari table tersebut dapat disimpulkan Pejabat Struktural berjenis kelamin Laki laki berjumlah 7 dan berjenis kelamin perempuan 17, Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin perempuan 9 orang, tenaga honorer berjenis kelamin laki – laki berjumlah 16 orang dan berjenis kelamin perempuan 34 orang sedangkan untuk tenaga sukarela berjenis kelamin laki- laki 2 dan kelamin perempuan 4 orang.

Sarana prasarana yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar per 31 Desember 2021 dimana Jumlah Asset yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Aset yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

NO	Aset yang dikelola	jumlah	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak	Hilang /Tidak Diketahui Keberadaannya
1	Mobil Jabatan	1	Unit	1	0	0
2	Mobil Operasional	12	Unit	9	3	0
3	Motor	162	Unit	130	26	5
4	Mesin Ketik Manual Standar	5	Buah	1	2	2
5	Lemari Besi / Metal/Lemari Rak Buku	5	Unit	3	0	2
6	Lemari Arsip /Lemari Besi	11	Unit	10	1	0
7	Lemari Kayu/ Almari	2	Buah	2	0	0
8	Rak Besi/ Metal	4	Unit	0	0	0
9	Rak kayu/Lemari Obat	2	Buah	1	1	0
10	Filing Kabinet Besi/ Metal	33	Unit	30	3	0
11	Brangkas	1	Unit	1	0	0
12	Lemari Kaca/Arsip Kaca	14	Unit	13	1	0
13	lemari Alokon	20	Unit	20	0	0
14	Papan Visual/ Papan Informasi Digital	1	Buah	1	0	0
15	Lemari buku pejabat	1	Buah	1	0	0
16	Papan Struktur Organisasi	1	Buah	1	0	0

17	Lemari Kayu	2	Buah	2	0	0
18	Meja Rapat	9	Buah	9	0	0
19	Kursi Rapat	24	Buah	16	8	0
20	Kursi Tamu	5	Buah	3	2	0
21	kursi kerja pejabat/ pimpinan	16	Buah	16	0	0
22	Kursi Putar/Rapat	24	Buah	10	14	0
23	Kursi susun	336	Buah	336	0	0
24	Meja Biro I	39	Buah	37	0	2
25	Meja 1/2 Biro	80	Buah	80	0	0
26	meja kerja pejabat esalon II	2	Buah	2	0	0
27	meja kerja pejabat esalon III	10	Buah	10	0	0
28	Kursi Sofa	2	Buah	2	0	0
29	Kursi Kerja/kursi tangan	107	Buah	103	4	0
30	Lemari Kulkas	2	Buah	0	0	0
31	Ac Unit	3	Unit	2	1	0
32	Kipas Angin	24	Unit	18	6	0
33	Kompore Gas	1	Buah	1	0	0
34	Rice Cooker	2	Buah	1	1	0
35	Tabung Gas	1	Buah	1	0	0
36	Treng Air	1	Buah	1	0	0
37	Lemari Dapur	5	Unit	2	3	0
38	TV	2	Unit	0	2	0
39	Power Supply	3	Unit	1	1	1
40	Dispenser	1	Buah	1	0	0
41	Handy CAM	2	Unit	0	2	0
42	gorden	1	Buah	0	1	0

Daftar Inventaris Barang Kantor Kecamatan Punggur Kabupaten Palembang 2016

43	Tabung Pemadam,	2	Buah	0	2	0
44	PC Unit	85	Unit	40	35	10
45	Note Book	89	Unit	8	42	39
46	monitor LCD	1	Unit	0	0	1
47	Printer	121	Unit	37	50	34
48	CPU Komputer	1	Unit	0	1	0
49	Scanner	1	Unit	1	0	0
50	Modem	75	Buah	4	41	30
51	Proyektor+ Attacment	14	Buah	12	1	1
52	Infokus	12	Unit	12	0	0
53	Kamera Digital	3	Unit	0	1	2
54	Layar Film /Proyektor	12	Unit	12	0	0
55	Handy Talky	18	Buah	0	14	4
56	Intyercome/RIQ	2	Buah	0	2	0
57	Smart Phone	157	Unit	156	0	1
58	Wirless Amplifer	14	Unit	11	1	2
59	Bangunan Balai KB	12	Buah	12	0	0
60	Bangunan Gudang Obat	1	Buah	1	0	0
61	KIE KIT	14	Buah	14	0	0
62	Mesin Fotocopy	1	Unit	1	0	0
63	Baggage Trolley/Trolley	2	Unit	2	0	0

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa akan datang.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dalam pembangunan atau mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- Masih kurangnya tingkat capaian KB Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)
- Tingkat Pemahaman kader belum merata tentang program Bangga Kencana
- Rasio tenaga medis yang mendapat pelatihan khusus CTU (Contraceptive Technology Update) masih Kurang
- Operator New Siga masih dalam tahap Penyesuaian data pada Aplikasi New SIGA
- Masih kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan POKTAN KB

D. Aspek Strategis Organisasi

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 48 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021, hal ini disebabkan telah berakhirnya masa RENSTRA 2015-2019, dan dikarenakan penetapan kolom kosong sebagai pemenang dalam pilkada Makassar sehingga Pemerintah Kota Makasar tidak memiliki RPJMD yang berisikan penjabaran visi misi kepala Daerah yang berpengaruh terhadap tidak tersusunya RENSTRA SKPD sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar mengacu kepada RKPD dimana Tema yang diusung oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu : “ Percepatan Pemulihan Ekonomi Hijau, Infrastruktur Berkelanjutan dan peningkatan sumber daya yang Inklusif”.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengevaluasi, membina, mengkoordinasikan, pengelolaan, dan mengendalikan

tugas-tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah Kota Makassar.

Permasalahan/Isu Strategis	Strategi dan Kebijakan	Sasaran kinerja	Indikator Sasaran	Program
Belum Optimalnya data Kependudukan	Pemenuhan Data dan Informasi Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui kerjasama lintas sektor	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Dalam pengendalian kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Total Fertility Rate	Program Pengendalian Penduduk
Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Pemenuhan Data dan Informasi Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Dalam pengendalian kuantitas Penduduk serta	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Program Pengendalian Penduduk

		Reproduksi		
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kelompok bina keluarga	Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dalam menyiapkan kehidupan keluarga yang berkualitas.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA 2021

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2021, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Walikota Makassar dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi dan target kinerja beserta anggaran. Target Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Keluarga Berencana Kota Makassar dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2021, dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		(Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90 %
2.	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,26
		Total Fertility Rate (TFR)	1,99
3.	Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	39,41 %
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	67 %
4.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	77,46 %
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB	70,72 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja adalah kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam pelaksanaan PP 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan Renja Tahun 2021 .

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021 telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan beberapa kebijakan telah diambil dan menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pendanaanya didukung oleh APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Fisik, DAK Penugasan serta DAK Non Fisik BOKB.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada tahun 2021 memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator kinerja, menunjukkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja (44,44%) telah mencapai target dan 5 indikator kinerja (55,56%) belum mencapai target. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan					
1.1	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Sesuai target
1.2	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	%	90	83,25	95,50	Tidak Mencapai Target
1.3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90	90	100	Sesuai Target
2.	Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta					

	terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk					
2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,26	1,23	102,44	Melebihi Target
2.2	Total Fertility Rate (TFR)		1,99	2,11	94,31	Tidak Mencapai Target
3.	Meningkatkan peran serta KKBPk, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi					
3.1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	%	39,41	32,61	82,75	Tidak Mencapai target
3.2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	%	67	67,96	101,43	Melebihi Target
4.	Meningkatnya Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN)					
4.1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	%	77,46	74,82	96,59	Tidak mencapai Target
4.2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	70,72	70,52	99,72	Tidak

yang ber KB					Mencapai Target
-------------	--	--	--	--	-----------------

Realisasi kinerja tahun 2021 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam menjalankan fungsi utamanya diuraikan dibawah ini:

1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan.
---	---

Sasaran Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 97,50% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN BERKEMBANGNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MEMUASKAN TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3			
1.1	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
1.2	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	%	90	83,25	92,50
1.3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	90	90	100
Rata-rata capaian					97,50

Capaian sasaran di atas adalah sebesar 97,50% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tingginya capaian sasaran tersebut didukung oleh adanya beberapa faktor penunjang keberhasilan antara lain:

1. Adanya Kerjasama antara Pejabat dan Staf dalam menjalankan program kegiatan.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan mitra terkait dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain Bappeda, ULP, BPKA, Dinas Kesehatan, BKKBN dalam melaksanakan Program Kegiatan.
3. Mengikutsertakan pejabat dan staf yang menangani administrasi keuangan dalam menghadiri sosialisasi dan pertemuan dalam mendukung pelaksanaan administrasi keuangan, Pembuatan dan pengarsipan dokumen keuangan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Aset BPKAD dalam pengelolaan aset Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Memberikan motivasi kepada ASN dan Non ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Terlaksananya rapat Koordinasi dalam pelaksanaan sub kegiatan yang melibatkan pejabat struktural DPPKB.
7. Mengikutsertakan Pejabat dan Staf dalam kegiatan rapat monitoring untuk dapat memonitoring pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang (1) pertama adalah Berkembangnya Kepemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan, untuk mencapai sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian rata-rata 100% sebagai berikut:

1. **Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**
Indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Perangkat daerah tahun 2021 sebesar 100%. Capaian target kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dicapai 100%.
2. **Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawain, Perlengkapan dan Keuangan)**

Indikator kinerja Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawain, Perlengkapan dan Keuangan) tahun 2021 sebesar 90%. Capaian target kinerja Indikator Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap

Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dicapai 83,25% atau 92,50% dari target.

3. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik tahun 2021 sebesar 90%. Capaian target kinerja Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dicapai 90% atau 100% dari target.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ /Triwulanan/Semesteran SKPD
3. **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.542.947.770 (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua juta Sembilan Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.256.411.346.(Enam Milyar Dua ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau 82,94%

Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Derah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Sasaran Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Derah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 98,38% sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kota Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Serta Terukurnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,26	1,23 *	102,44
1.2	Total Fertlility Rate (TFR)		1,99	2,10	94,76
Rata-rata capaian					98,59

* BPS tahun 2020

Rata-rata capaian sasaran di atas tahun 2021 adalah sebesar 98,59% atau kategori sangat tinggi. Capaian realisasi tahun 2021 masih menggunakan realisasi tahun 2020 dikarenakan masih menunggu data dari BPS. Tingginya capaian sasaran dibandingkan dengan target capaian didukung oleh adanya beberapa faktor penunjang keberhasilan antara lain:

2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk ditargetkan sebesar 1,26 LPP dengan realisasi sebesar 1,23 LPP atau mencapai 102,44% dari target tahun 2021. Dari capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini menunjukkan adanya penurunan angka laju pertumbuhan penduduk di kota Makassar dimana indikator LPP semakin rendah semakin baik dikarenakan merupakan target menurun. Capaian ini disebabkan dengan adanya pelayanan KB disetiap tingkatan wilayah kecamatan serta dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), Mortalitas (Kematian) dan urban / ruralisasi,. Selain itu capaian tersebut didukung adanya sinkronisasi data dari mitra kerja yaitu dari instansi BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dukungan operasional capaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga yang secara optimal di tingkat lini lapangan.

Realisasi indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2021 dengan realisasi sebesar 1,23 atau 102,44% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,23 LPP atau 100% , capaian sama 100% dikarenakan untuk data capaian tahun 2021 masih menggunakan data 2020 karena masih menunggu data dari BPS.

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- Adanya sinkronisasi kebijakan antara mitra kerja untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan:

- Peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja dan Lintas Sektor

2.2. Total Fertility Rate (TFR)

Indikator Total Fertility Rate (TFR) tahun 2021 ditargetkan 1,99 TFR dengan realisasi 2,10 TFR atau mencapai 94,76% dari target tahun 2021. Capaian TFR Kota Makassar dicapai sebesar 2,10 atau 94,76% terhadap target 1,99 pada tahun 2021 dimana Total Fertility Rate (TFR) tidak mencapai target disebabkan oleh karena adanya penurunan capaian peserta KB baik akseptor KB baru maupun Aktif yang diakibatkan karena covid 19 sehingga banyak terjadi Drop Out.

Realisasi Indikator TFR tahun 2021 dengan realisasi sebesar 2,10 atau 94,76% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,11 atau 97,17% mengalami peningkatan sebesar 2,41% (target ini merupakan target menurun), adapun perhitungan target indikator Total fertility Rate sebagai berikut :

Perhitungan TFR

$$ASFR = \frac{bi}{pi} 1000$$

Bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun s/d 45-49 tahun

Pi = Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun s/d 45-49 tahun

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 - 19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15 - 19}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{1.070}{46.971} \times 1000 = 22,95$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 20 - 24}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 20 - 24}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{3.090}{45.744} \times 1000 = 67,72$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 25 - 29}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 25 - 29}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{4.540}{42.081} \times 1000 = 107,88$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 30 - 34}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 30 - 34}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{4.962}{40.690} \times 1000 = 121,95$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 35 - 39}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 35 - 39}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{2.913}{40.741} \times 1000 = 71,50$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 40 - 44}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 40 - 44}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{1.088}{39.332} \times 1000 = 27,60$$

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 45 - 49}}{\text{Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 45 - 49}} \times 1000$$

$$ASFR = \frac{838}{36.303} \times 1000 = 2,30$$

$$ASFR = \sum ASFR_i = 421,96$$

$$TFR = 5 \sum ASFR_i$$

$$= 5 \times 421,96$$

$$= 2109,8 / 1000$$

$$= 2,10$$

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Lintas sektor serta konseling informasi dan edukasi pelayanan KB.

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Koordinasi dan Kerjasama dengan lintas sektor
- b. Peningkatan Pelayanan KB
- c. Adanya dukungan Operasional pelaksanaan bangga kencana ditingkat lini lapangan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Lintas sektor serta konseling informasi dan edukasi pelayanan KB.

Dalam mendukung pencapaian target tahun 2021 pada Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembagunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - Advokasi , Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 - Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Perumusan Parameter Kependudukan
 - Penyusunan Profil Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Pencapaian target Indikator Program Pengendalian Penduduk didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 404.434.200,- (Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 374.566.408,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau sebesar 92,61%

3	Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi
---	---

Sasaran Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 92,09% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator kinerja sasaran Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
3.1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	%	39,41	32,61	82,74
3.2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	%	67	67,96	101,43
Rata-rata capaian					92,09

Uraian capaian kinerja atas 2 (dua) indikator kinerja Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:

3.1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkan 39,41% dan terealisasi 32,61% atau dengan capaian 82,74%. Sehingga realisasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{jumlah akseptor KB}}) \times 100$$

$$(x = \frac{39.091}{119.866} \times 100) = 32,61\% \text{ realisasi, dari target } 39,41\%$$

Capaian MKJP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5
Capaian Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH AKSEPTOR KB	JUMLAH MKJP	%
1	MARISO	6.136	2.863	46,66
2	MAMAJANG	4.502	1.073	23,83
3	MAKASSAR	6.475	1.996	30,83
4	UJUNG PANDANG	1.886	1.017	53,92
5	WAJO	1.642	847	51,58
6	BONTOALA	5.239	1.895	36,17
7	TALLO	15.256	4.974	32,60
8	UJUNG TANAH	3.096	1.030	33,27
9	PANAKUKANG	10.804	2.933	27,15
10	TAMALATE	14.403	5.259	36,51
11	BIRINGKANAYA	18.114	5.706	31,50
12	MANGGALA	11.190	3.014	26,93
13	RAPPOCINI	10.591	3.896	36,79
14	TAMALANREA	9.029	2.344	25,96
15	SANGKARRANG	1.503	244	16,23
	MAKASSAR	119.866	39.091	32,61

Sumber Data: statistik rutin 2021

Realisasi indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tahun 2021 sebesar 32,61% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82,75% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 30,68% atau capaian kinerja sebesar 82,12% mengalami kenaikan 0,63%.

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Melaksanakan pelayanan KB di wilayah khusus seperti wilayah kepulauan, serta wilayah padat kumuh.
- b. Memanfaatkan momentum program pelayanan sejuta akseptor dalam rangka Harganas (hari Keluarga Nasional), TNI Manunggal KB Kesehatan, PKK KB KES, Bhayangkara KB KES dan pelayanan hari kontrasepsi sedunia.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan melakukan:

- a. Menjalin Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pelayanan KB.
- b. Melaksanakan kegiatan yang sifat momentum
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas Kesehatan (Faskes).

3.2 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun tahun 2021 dengan target 67%. dengan realisasi sebesar 67,96% atau capaian sebesar 101,43%

Untuk menghitung realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun 2021 adalah :

- a. Jumlah peserta KB Aktif sebanyak 119.866
- b. Jumlah Pasangan usia subur (PUS) sebanyak 176.387

Sehingga dapat dihitung realisasi sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{Jumlah Akseptor KB aktif}}{\text{Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{119.866}{176.387} \times 100\%) = 67,96\% \text{ realisasi, dari target } 67,00\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{67,96\%}{67\%} \times 100\%) = 101,43\%$$

Tabel 3.6
Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-19 Tahun

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH AKSEPTOR KB	%
1	MARISO	8.871	6.136	69,17
2	MAMAJANG	6.886	4.502	65,38

3	MAKASAR	9.618	6.475	67,32
4	UJUNG PANDANG	2.773	1.886	68,01
5	WAJO	2.431	1.642	67,54
6	BONTOALA	7.976	5.239	65,68
7	TALLO	22.496	15.256	67,82
8	UJUNG TANAH	4.603	3.096	67,26
9	PANAKUKKANG	15.761	10.804	68,55
10	TAMALATE	20.830	14.403	69,15
11	BIRINGKANAYA	26.526	18.114	68,29
12	MANGGALA	16.664	11.190	67,15
13	RAPPOCINI	15.352	10.591	68,99
14	TAMALANREA	13.359	9.029	67,59
15	SANGKARRANG	2.241	1.503	67,07
MAKASSAR		176.387	119.866	67,96

Realisasi tersebut dapat dicapai dengan adanya dukungan pelayanan peserta KB secara berkesinambungan dari semua tempat pelayanan baik yang dilayani oleh Faskes maupun dilayani dengan pelayanan KB melalui kegiatan Pelayanan KB Kepulauan.

Realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 tahun 2021 dengan realisasi sebesar 101,43% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak dijadikan indikator pada tahun 2020.

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Memfasilitasi akseptor KB mendapatkan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan
- b. Memanfaatkan momentum Pelayanan KB
- c. Menjamin ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Fasilitas Kesehatan (Faskes).
- d. Meningkatkan Intensitas KIE di lini lapangan.

Pencapaian target indikator kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.917.704.000,- (Delapan Milyar Sembilan ratus Tujuh belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.7.485.111.145,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 83,94%.

4 Meningkatkan Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN)

Sasaran Meningkatkan Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN) diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 98,16% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
4.1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	%	77,46	74,82	96,59
4.2	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB	%	70,72	70,52	99,72
Rata-rata capaian					98,16

1.1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

Untuk Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB ditargetkan sebesar 77,46%. Realisasi Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB sebesar 74,82% atau 96,59 % , dihitung melalui jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB dibagi dengan jumlah anggota kelompok BKB.

- Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB Tahun 2021 sebanyak 8.617
- Jumlah anggota anggota kelompok BKB sebanyak 11.517

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$(x = \frac{\text{jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB}}{\text{jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{8.617}{11.517} \times 100\%) = 74,82\% \text{ realisasi, dari target } 77,46\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{74,82\%}{77,46\%} \times 100\%) = 96,59\%$$

Capaian Jumlah PUS Bina Keluarga Per kecamatan dapat dilihat pada Tabel Berikut Berikut :

TABEL 3.8
Capaian Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK BKB	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK BKB YANG BER KB	%
1	MARISO	407	298	73,22
2	MAMAJANG	1.383	994	71,87
3	MAKASSAR	749	407	54,34
4	UJUNG PANDANG	330	202	61,21
5	WAJO	268	171	63,81
6	BONTOALA	1.227	918	74,92
7	TALLO	1.926	1.558	80,89
8	UJUNG TANAH	456	339	74,34
9	PANAKUKANG	771	562	72,89
10	TAMALATE	989	796	80,49
11	BIRINGKANAYA	848	709	83,61
12	MANGGALA	598	395	66,05
13	RAPPOCINI	622	442	71,06
14	TAMALANREA	780	693	88,85
15	SANGKARRANG	163	133	81,60
	MAKASSAR	11.517	8.617	74,82

Sumber Data : Statistik Rutin 2021

Realisasi indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB tahun 2021 sebesar 74,82% atau sebesar 96,59% dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 75,02 % atau sebesar 96,30% .

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a) Melakukan pembinaan kader kelompok BKB ditingkat lini lapangan
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor
- c) Memberikan Orientasi bagi kader BKB tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan melakukan:

- a) Meningkatkan pembinaan kader kelompok BKB ditingkat lini lapangan.
- b) Meningkatkan dukungan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan kelompok BKB.
- c) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keikutsertaan keluarga sasaran dalam kelompok kegiatan bina Keluarga Balita.

1.2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB

Untuk persentase PUS terhadap bina keluarga Remaja tahun 2021 ditargetkan sebesar 70,72 %. Realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB 70,52%, capaian ini dihitung melalui jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB dibagi dengan jumlah anggota kelompok BKR.

- Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB Tahun 2021 : 6.248
- Jumlah anggota kelompok BKB : 8.860

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$(x = \frac{\text{jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB}}{\text{jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{6.248}{8.860} \times 100\%) = 70,52\% \text{ realisasi, dari target } 70,72\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{70,52\%}{70,72\%} \times 100\%) = 99,72 \%$$

Capaian Jumlah PUS Bina Keluarga Remaja Per kecamatan dapat dilihat pada Tabel Berikut Berikut :

TABEL 3.9
Capaian Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK BKR	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK BKR YANG BER KB	%
1	MARISO	301	265	88,04
2	MAMAJANG	901	613	68,04
3	MAKASSAR	677	347	51,26
4	UJUNG PANDANG	315	152	48,25
5	WAJO	235	149	63,40
6	BONTOALA	1.010	723	71,58
7	TALLO	1.816	1.432	78,86
8	UJUNG TANAH	330	269	81,52
9	PANAKUKANG	570	320	56,14
10	TAMALATE	749	563	75,17
11	BIRINGKANAYA	512	398	77,73
12	MANGGALA	448	284	63,39
13	RAPPOCINI	412	284	68,93
14	TAMALANREA	483	360	74,53
15	SANGKARRANG	101	89	88,12
	MAKASSAR	8.860	6.248	70,52

Sumber Data : Statistik Rutin 2021

Realisasi Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKR) yang ber KB tahun 2021 sebesar 70,52 atau mencapai 99,72% dibandingkan tahun 2020 realisasi sebesar sebesar 75,95 atau mencapai 101,65% terjadi penurunan sebesar 1,95%

Upaya-upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Melakukan pembinaan kader kelompok BKR ditingkat lini lapangan
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor
- c. Memberikan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi kader BKR

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan melakukan:

- a. Meningkatkan pembinaan kader kelompok BKR ditingkat lini lapangan.

- b. Meningkatkan dukungan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan kelompok BKR.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keikutsertaan keluarga sasaran dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja.

Pencapaian target indikator kinerja program, kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 1.065.291.200,- (satu Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 936.332.318,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) atau 87,89%.

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi capaian keuangan yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2021 dari rencana kerja yang telah ditetapkan hingga bulan Desember tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

TABEL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

No	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.542.947.770	6.256.411.346,00	82,94
1.1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	131.569.000	88.012.290,00	66,89
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.640.000	55.475.650,00	77,44

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.730.000	7.282.560,00	62,08
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.790.000	6.400.000,00	65,37
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.442.000	7.282.560,00	69,74
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.442.000	6.400.000,00	61,29
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.240.000	2.523.840,00	59,52
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.285.000	2.647.680,00	19,93
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.600.045.970	5.515.172.665,00	83,56
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.146.580.970	5.158.101.265,00	83,92
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.200.000	219.500.000,00	85,68
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186.274.000	134.012.000	71,94
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.855.000	441.280,00	7,54
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulnana/Triwulan/ Semesteran SKPD	5.136.000	3.118.120,00	60,71
1.3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.370.000	1.574.840,00	66,45
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.370.000	1.574.840,00	66,45
1.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.982.000	66.072.220,00	86,96
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000	51.750.000,00	95,83
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.982.000	14.322.220,00	65,15
1.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	214.276.000	123.576.100,00	57,67

1.5.1	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	99.254.000	33.666.850,00	33,92
1.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.022.000	60.109.400,00	76,07
1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000	29.799.850	82,78
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.000.000	41.580.000	83,16
1.6.1	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	41.580.000	83,16
1.7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	283.284.000	269.278.356	95,06
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	258.788.400	249.016.516,00	96,22
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.495.600	2.261.840,00	34,82
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000,00	100,00
1.8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	185.420.800	151.144.875,00	81,51
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	19.586.800	14.946.950,00	76,31
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.214.000	106.817.925,00	78,42
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.620.000	29.380.000	99,19
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	404.434.200	374.566.408,00	92,61
2.1	PEMADUAN DAN SINGKRONISASI KEBUJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	187.363.000	182.800.000,00	97,56

2.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tingkat Kab/Kota	46.785.000	46.000.000,00	98,32
2.1.2	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal	70.289.000	67.500.000,00	96,03
2.1.3	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	70.289.000	69.300.000,00	98,59
2.2	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN KOTA	217.071.200	191.766.408,00	88,34
2.2.1	Perumusan Parameter Kependudukan	47.585.000	44.550.000,00	93,62
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	46.981.000	44.150.000,00	93,97
2.2.3	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	41.185.000	40.400.000,00	98,09
2.2.4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	81.320.200	62.666.408,00	77,06
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	8.917.704.200	7.485.111.145,00	83,94
3.1	PELAKSANAAN ADVOKASI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.289.838.000	1.042.144.890	80,80
3.1.1	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	65.243.000	59.828.800	91,70
3.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK	74.969.000	66.988.400,00	89,35

	sesuai Kearifan Budaya Lokal			
3-1.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	192.690.000	171.456.000,00	88,98
3-1.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	65.000.000	65.000.000,00	100,00
3-1.5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	891.936.000	678.871.690,00	76,11
3.2	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	4.815.251.000	4.002.533.228,00	83,12
3.2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	630.771.000	569.013.228,00	90,21
3.2.2	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	4.184.480.000	3.433.520.000,00	82,05
3-3	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN KOTA	1.861.853.200	1.596.398.327,00	85,74
3-3.1	Pengendalian pendistribusian Alkon dan Sarana Penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	251.962.000	100.950.000,00	40,07
3-3.2	Peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik Alkon serta sarana penunjang pelayanan KB	41.996.000	38.050.000,00	90,60
3-3.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	869.240.000	849.076.015,00	97,68
3-3.4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	500.500.000	430.169.384,00	85,95
3-3.5	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB	89.349.200	81.640.128,00	91,37
3-3.6	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas	13.003.000	10.612.800,00	81,62

	Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			
3-3-7	Peningkatan dan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	37.586.000	34.950.000,00	92,99
3-3-8	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.829.000	16.000.000,00	76,82
3-3-9	Peningkatan Kesertaan KB Pria	37.388.000	34.950.000,00	93,48
3-4	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER KB	950.762.000	844.034.700,00	88,77
3-4-1	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	142.951.000	101.159.700,00	70,77
3-4-2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	773.520.000	742.875.000	96,04
3-4-3	Pembinaan Terpadu Kampung KB	34.291.000	0,00	0,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.065.291.200	936.332.318,00	87,89
4-1	PELAKSANAAN PEMBAGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	993.248.200	867.132.318,00	87,30
4-1-1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	44.000.000	36.404.750,00	82,74
4-1-2	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	37.443.000	34.950.000,00	93,34

	UPPKS)			
4.1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS)	840.653.200	725.877.568,00	86,35
4.1.4	Promosi dan sosialisasi, kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	71.152.000	69.900.000,00	98,24
4.2	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBAGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	72.043.000	69.200.000,00	96,05
4.2.1	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	72.043.000	69.200.000,00	96,05

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dapat menyajikan realisasi keuangan Tahun 2021 sebesar Rp. 15.052.421.217,- (Lima Belas Milyar Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 83,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp., 17.930.377.370,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah), Anggaran tersebut digunakan untuk Program, kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2021 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Tema RKPD tahun 2021 yaitu Percepatan pemulihan ekonomi hijau, infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan sumber Daya Manusia yang inklusif. Sejalan dengan itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar telah berakuntabilitas sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAPORAN KINERJA ini telah disusun berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran berkategori sangat tinggi yaitu:

1. Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan dengan capaian 97,50%
2. Terlaksananya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota dalam pengendalian Kuantitas Penduduk serta terukurnya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dengan capaian 98,38%
3. Meningkatkan peran serta KKBPK, Peningkatan PUS menjadi peserta KB baru dan Pembinaan peserta KB aktif serta Peningkatan kesehatan Reproduksi dengan capaian 92,09%
4. Meningkatnya Peran serta Masyarakat Melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN) dengan capaian 98,16%

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menetapkan beberapa strategi, antara lain:

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Peningkatan kualitas data dan informasi serta metode analisis untuk penetapan prioritas program
3. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah, dalam lingkup Kota Makassar.
4. Jaminan ketersediaan pelayanan dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan
5. Penggerakan sumber daya masyarakat (Kader KB) untuk mendukung penyelenggaraan program KB.

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan program dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka dipandang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi, pelatihan dan orientasi terhadap peningkatan sumber daya manusia bagi pengelola program bangga kencana ditingkat lini lapangan,
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang program bangga kencana,
3. Perlunya penambahan tenaga penyuluh keluarga berencana,
4. Perlunya Pembinaan terhadap kelompok Kelompok kegiatan masyarakat yang mendukung program KB

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

Makassar, 29 Januari 2021

Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN

PEMUDUK DAN KELURGA BERENCANA



drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. 19680829 200604 2 006